



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahannya bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke "World Food Conference" di Italia, pada tanggal 5 Nopember 1974 hingga 16 Nopember 1974

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Menteri Pertanian/Ketua Komite Nasional F.A.O. bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia

Untuk :

PERTAMA : Menggunakan petunjuk-petunjuk pengarahannya sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas Pada "World Food Conference" di Roma, Italia, pada tanggal 5 Nopember 1974 hingga 16 Nopember 1974.

KEDUA : Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan konperensi selama berlangsungnya konperensi tersebut.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik Indonesia menghadiri "World Food Conference" di Roma, Italia, pada tanggal 5 nopember 1974 hingga 16 Nopember 1974.

Instruksi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Oktober 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGARAHAN UNTUK DELEGASI  
REPUBLIK INDONESIA KE "WORLD FOOD CONFERENCE"  
DI ROMA, TANGGAL 5 - 16 NOPEMBER 1974.

I. PENDAHULUAN

1. Sebagai yang telah digariskan MPR dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, maka politik luar negeri Indonesia harus diabdikan kepada kepentingan nasional, khususnya untuk menunjang pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia.
2. Pemerintah Indonesia berpendirian, bahwa masalah pangan dunia yang mencapai puncaknya dengan krisis pangan akhir tahun 1972, pada dasarnya adalah merupakan suatu rentetan krisis-krisis di bidang ekonomi dan sosial yang melanda dunia dewasa ini. Kenyataan ini menumbuhkan kesadaran perlunya mengadakan perubahan tata hubungan perekonomian dunia.
3. Sidang Khusus ke VI Majelis Umum PBB yang menghasilkan Pernyataan (deklarasi) dan Pedoman Aksi mengenai tata perekonomian yang baru yang didasarkan atas keadilan, persamaan dan kedaulatan penuh bagi setiap negara, telah menonjolkan pula perlunya pemecahan masalah pangan.
4. Dalam hubungan inilah Pemerintah Indonesia memandang "World Food Conference" sebagai suatu forum yang sangat penting dalam usaha memecahkan masalah pangan dunia, dan untuk pertama kali diadakan dalam tingkat politik tinggi dan pembahasan masalahnya dilakukan dalam perspektif hubungan ekonomi yang lebih luas, dalam rangka usaha pelaksanaan tata perekonomian dunia baru.

II. SASARAN KONPERENSI YANG INGIN KITA CAPAI

5. Indonesia yang pada waktu ini sedang melaksanakan REPELITA II dimana peningkatan produksi pangan dan pertanian merupakan prioritas utama, sangat mengharapkan agar "World Food Conference" dapat mencapai hasil-hasil yang kongkrit, yang langsung atau tidak langsung akan menunjang pelaksanaan REPELITA II dan REPELITA-REPELITA berikutnya, antara lain :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

a. Ruang lingkup nasional,

- (i) Membantu mempercepat proses peningkatan produksi pangan dan konsumsi termasuk peningkatan taraf gizi penduduk sehingga dengan demikian ketergantungan pada bantuan pangan dari luar negeri dapat dikurangi.
- (ii) Membantu mempercepat pengadaan dan pembinaan stock pangan.
- (iii) Membantu terjaminnya arus sarana-sarana produksi pangan.

b. Ruang lingkup internasional.

- (i) Membantu mempercepat produksi pangan di negara sedang berkembang :
- (ii) Pembentukan "internatfonal stock arrangements" antara lain dalam bentuk "World Food Security" untuk menampung kekurangan pangan bila terjadi kerusakan panen.
- (iii) Memperkuat dan memperbaiki peranan "World Food Programme" khususnya dan bantuan pangan pada umumnya. agar dalam usahanya memberikan bantuan pangan kepada negara-negara berkembang lebih sanggup lagi memenuhi permintaan untuk menanggulangi keadaan darurat dan untuk pembangunan sosial ekonomi.

### III. PEMBIAYAAN

6. Keputusan-keputusan apapun yang dihasilkan akan membutuhkan tindak lanjut. Mengenai aspek pembiayaanya jelas sangat diperlukan dana-dana dalam jumlah besar. Dalam hubungan ini negara-negara maju atau negara-negara kaya lainnya, dan badan-badan keuangan Internasional diharapkan dengan sangat memberikan bantuan dana bagi suksesnya pelaksanaan keputusan-keputusan atau kesimpulan-kesimpulan yang akan dihasilkan "World Food Conference" tersebut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### IV. "WORLD FOOD AUTHORITY"

7. Indonesia pada dasarnya dapat mendukung usul-usul tindakan nasional dan internasional sebagai yang dikeemukakan oleh Sekretaris Jenderal "World Food Conference" dalam rangka menanggulangi masalah pangan dunia. Dalam hubungan ini Indonesia pada dasarnya dapat menerima gagasan pembentukan "World Food Authority", dengan pengertian bahwa dewasa ini Indonesia belum dapat memberikan "commitment" mengenai pemberian sumbangan finansial yang diperlukan "Authority" tersebut. Kalau "Authorty" ini dibentuk, sudah selayaknya bila pada tahap-tahap permulaan sebanyak mungkin dipergunakan organisasi ataupun "agency" internasional yang telah ada, kecuali jika ada alasan-alasan yang kuat membenarkan pembentukan badan-badan baru.

#### V. "WORLD FOOD SECURITY"

8. Indonesia dapat menerima konsep "International Undertaking on World Food Security" yang dipandang sebagai kegiatan bersama yang sangat mendesak untuk menanggulangi kekurangan pangan setempat dan harga pangan yang melonjak. Hendaknya ini dapat dijadikan bagian integral dari "World Food Authority" bila dibentuk nanti.

#### VI. BANTUAN PANGAN

9. Indonesia, walaupun tidak tergolong dalam negara-negara sangat terbelakang, masih tetap membutuhkan bantuan pangan dalam volume yang layak untuk membantu proyek-proyek pembangunannya. Di samping keperluan bantuan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan untuk pembangunan sosial ekonomi di negara-negara sedang berkembang, perlu diusahakan pula agar bantuan pangan jangan sernata-rnata diandalkan atas surplus akan tetapi kelestarian perlu dipelihara dengan perencanaan bantuan pangan yang sempurna.

#### VII. LAIN -LAIN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

10. Mengenai persoalan-persoalan yang tidak prinsipil diserahkan kepada kebijaksanaan Delegasi, dengan pedoman agar mengambil langkah yang menguntungkan kepentingan Indonesia.

31 - 10 - 1974.